



RENSTRA

**Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

TAHUN 2016 - 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1 - 3
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
- Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
- Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25



BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5	Penentuan Isu – isu Strategis.....	38
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	40
	- Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	- Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	46



BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	- Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	49
Bab VII.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
	- Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	67
BAB VIII.	PENUTUP	
	Penutup.....	69



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. rencana strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka di implementasi perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga seluruh aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu dibidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi-indikasi, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah yang baik (*good governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.



Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini, pelayanan prima (*service exelence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik/ pelanggan. pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. pelayanan prima seperti ini yang harus diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. untuk itulah komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan pekerjaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima, seperti : semangat kompetisi, inovatif perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*learning organization*).

Salah satu instrument untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan prima adanya perumusan rencana strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi organisasi.



Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen Renstra, Hal ini telah diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yaitu Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1.2. LANDASAN HUKUM

Sejalan Dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rjpd Dan Rjmd, Serta Tata Cara Perubahan Rjpd, Rjmd Dan Rkpd.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan infrastruktur merupakan dokumen pembangunan untuk tahun anggaran 2016 - 2021.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan lain-lain di kabupaten kapuas hulu sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.



Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah :

- A. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 - 2021;
- B. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2016 - 2021.

Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. dengan tersusunnya renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan

- 2.1. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

-Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



-Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN

Dalam Bab ini dipaparkan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

-Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII : KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas, Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas :

“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Drainase dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Drainase;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Drainase;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Drainase;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

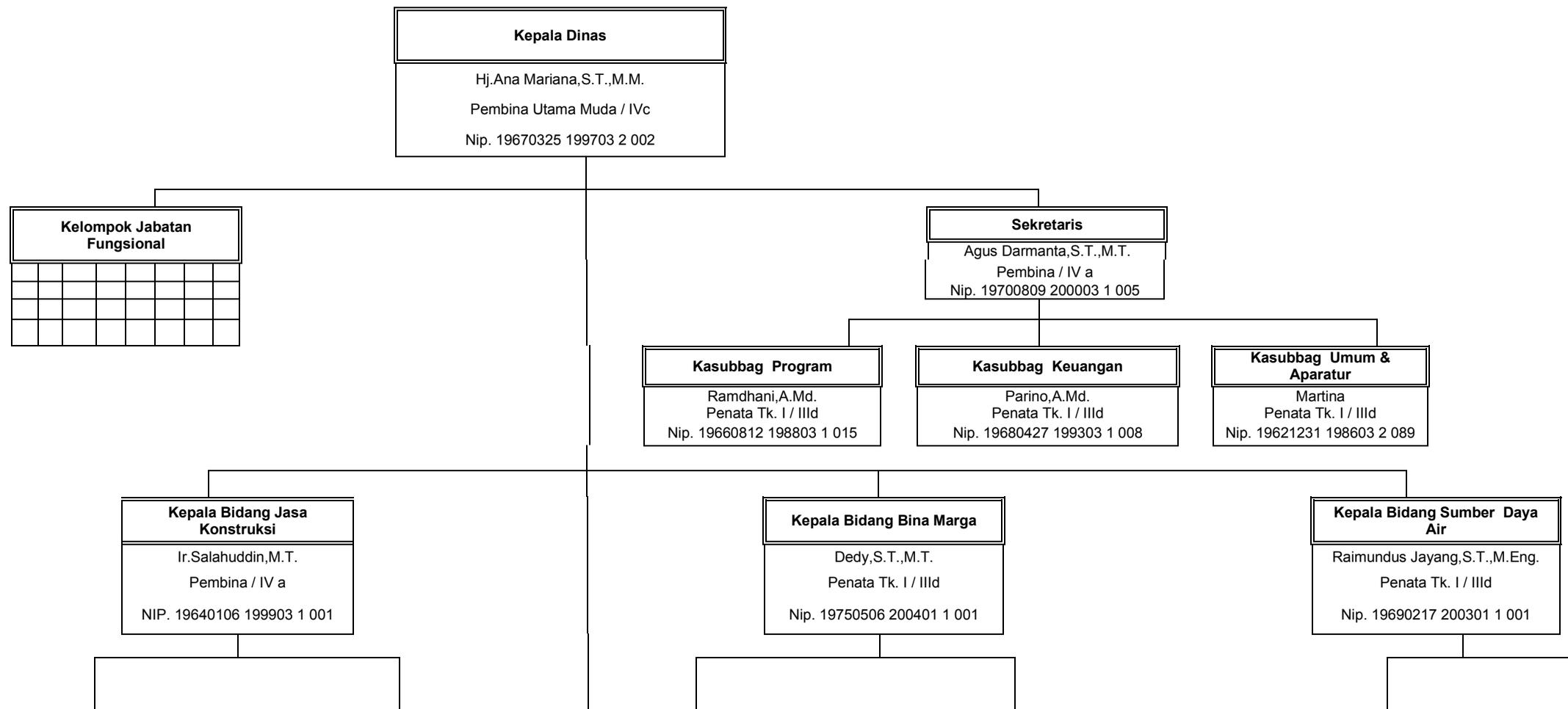


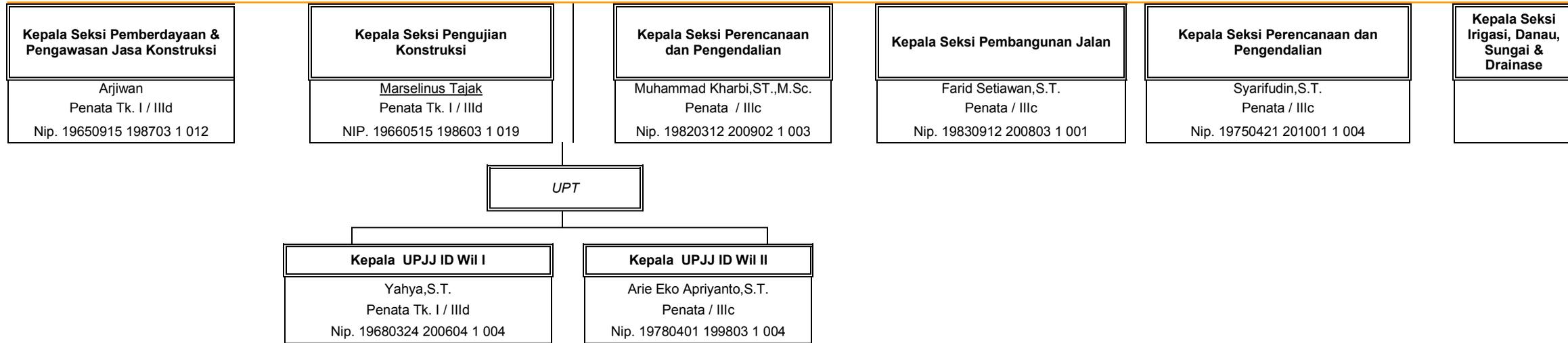
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris.
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Aparatur.
- 3) Bidang Bina Marga.
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan.
- 4) Bidang Sumber Daya Air.
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Irigasi, Danau, Sungai dan Drainase.
- 5) Bidang Jasa Konstruksi.
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Pengujian Konstruksi.
- 6) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
 - a) UPJJID Wilayah I
 - b) UPJJID Wilayah II



STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 51 TAHUN 2016





2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Hulu telah menempati gedung yang terletak di Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- Dump Truck : 5 Buah



- Pick Up : 8 Buah
- Alat Berat : 2 Buah
- Kendaraan Roda Dua : 49 Buah

Sarana pendukung dan perlengkapan kantor lainnya sampai tahun 2018 yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Air Compressor	2	Unit
2	Alat Penyemprot Rumput 20 Liter	4	Buah
3	Alat Ukur / Meteran	28	Buah
4	Almari	10	Buah
5	Almari Arsip	9	Buah
6	Ac	13	Buah
7	Absorbsion Of fine Aggregare	1	Set
8	Brang Kas	2	Buah
9	Batterei Charger	3	Unit
10	Bench Grinder	2	Unit
11	Compaction Test	1	Set
12	Concreat Mixer	4	Unit
13	Compression Tester Manchnine	2	Unit
14	Chain Heist	2	Unit



15	CCTV	1	Unit
16	Concrete Hammer Test	3	Set
17	Core Drilling Machine	1	Set
18	Concrete Cylinder Mold (15 Cm Dia X 30 Cm Height)	4	Set
19	Digital Balance Cap	1	Pc
20	Dispenser	14	Buah
21	Dutch Cone Penetrometer DCP Type ST-40	2	Set
22	Ductility Of Botumoniuis	1	Buah
23	Digital Balance	2	Buah
24	Diamond Bit 4"	1	Pc
25	Drying Oven 32 Liter	1	Pc
26	Diamond Bit Series Bit Diameter 4" Beton	1	Set
27	Electric Sieve Shaker	1	Set
28	Electric Angle Disk Grinder	1	Unit
29	Electrict Drill 3/8	2	Unit
30	Flash And Fire Point test	2	Buah
31	Filing Kabinet	25	Buah
32	Faximile	1	Buah



33	Flashdisk	32	Buah
34	Gorden	1	Set
35	Gas Welding/Cutting Set	1	Unit
36	Gerobak Roda 2	4	Buah
37	Gerobak Roda 1	4	Buah
38	Hard Disk	4	Buah
39	Hand Grease Gun	4	Unit
40	Hidrolic Jack 10 Ton	3	Unit
41	Hydrolic Tester Portable	1	Unit
42	Handycamp	7	Buah
43	Hydrometer Analysis Test	1	Set
45	Internet (Tahun 2017)	1	Paket
46	Infokus/LCD Proyektor	3	Buah
47	Jaringan Komputer	1	Paket
48	Jam Dinding	21	Buah
49	Jaringan/Saluran Iternet Astinet (Tahun 2012)	1	Unit
50	Kursi Putar	1	Buah
51	Kursi Plastik	10	Buah
52	Kursi Lipat	23	Buah
53	Kursi Kayu	4	Buah



54	Kursi Kerja	262	Buah
55	Komputer Pc	16	Buah
56	Karbit	5	Kaleng
57	Kotak Lelang	20	Buah
58	Kunci Shock	3	Unit
59	Kunci Pas	3	Unit
60	Kursi Kerja Direksi	3	Buah
61	Kursi Keja 1 Biro	6	Buah
62	Kulkas	1	Buah
63	Kelengkapan Komputer	7	Buah
64	Kamera Digital (Kamera Survey)	38	Buah
65	GPS	12	Buah
66	Lemari Arsip Besi	8	Buah
67	Los Angeles Abrassion Machine AT-40	1	Set
68	Laboratory Concrete Mixer (Eletrik)	1	Set
69	Laboratory Penetration Test	1	Buah
70	Laboratory CBR Test	1	Set
71	Liquid Limit Test	1	Set
72	Mesin Chain Show 070	3	Unit
73	Mesin Chain Show 038	3	Unit
74	Mesin Potong Rumput	20	Unit



75	Mesin Genset Kapasitas 10 Kw	3	Buah
76	Mobil Floor Crane 3 Ton	2	Unit
77	Mesin Chain Show	1	Unit
78	Mesin Las	1	Unit
79	Mesin Las Oksigen	1	Unit
80	Mesin Chain Show 040	2	Unit
81	Mesin Gerinda Duduk	2	Unit
82	Mesin Bor	2	Unit
83	Monitor Display	2	Buah
84	Meja Kerja 1 Biro	9	Buah
85	Meja Kerja 1/2 Biro	77	Buah
86	Meja Kerja Kepala Dinas	1	Buah
87	Mesin Tik	3	Buah
88	Mesin Hitung	2	Buah
89	Mikropon	1	Buah
90	Meja Kerja	1	Buah
91	Mesin Jilid	1	Buah
92	Mesin Potong Kertas	1	Buah
92	Meja Kerja Satpam	1	Buah
93	Meja Rapat	14	Buah
94	Meja Kerja Panjang	1	Buah



95	Mesin Sedot Air	2	Buah
96	Mesin Genset	1	Buah
97	Meteran Roda	4	Buah
98	Notebook	56	Buah
99	Nozzle Tester Machine	3	Unit
100	Organic Imputeries Test	1	Set
101	Papan Struktur Organisasi	2	Buah
102	Papan Data Pegawai	1	Buah
103	Papan Nama Kantor	2	Buah
104	Papan Pengumuman	1	Buah
105	Puller 6-10 Ton	2	Unit
106	Pompa Kompesor	1	Buah
107	Papan Kegiatan Kadis	1	Buah
108	Pan Nama Darma Wanita	1	Buah
109	Pompa Air Robin	2	Buah
110	Printer	106	Buah
111	Pasir Quarsa	10	Kg
112	Proving Ring 6000 Lbs Capacity	1	Pc
113	Plonter	1	Unit
114	Plastik Limit Test	1	Set
115	Rambu Ukur / Alat GPS	16	Buah



116	Rak Arsip Besi Siku	40	Buah
117	Speed Boart/Mesin+Body	2	Unit
118	Suction Pump Oil	1	Unit
119	Swivel Banck Vise	2	Unit
120	Sipat Latar (Waterpass Topcon)	4	Unit
121	Sofa	3	Set
122	Sound System	1	Buah
123	Scener	1	Buah
124	Softening Point Test	2	Buah
125	Sand Cone Test	2	Set
126	Spesific Grafity Test	1	Set
127	Slum Test	2	Set
128	Saybold Viscmeter	1	Set
129	Sand Equivalent Test	1	Set
130	Tangga Lipat	1	Buah
131	Trelley Jack 5 Ton	1	Unit
132	Tarvo Las Listrik	1	Unit
133	Teodolite	4	Unit
134	Televisi	2	Buah
135	UPS	29	Buah
136	Universal Testing Machine	1	Set



137	Vulkanizing Unit	1	Unit
138	VCD Player	1	Buah
139	Vertical Impuraties Capping	1	Set
140	Welding Transpormer	1	Unit
141	White Board	4	Buah
142	Wireles	1	Buah
143	Water Bath	1	Buah

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Strategi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk membangun di segala bidang melalui misi ketiga Bupati/ Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 yaitu meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah peningkatan pelayanan umum (*publik service*) meliputi peningkatan infrastruktur, sarana fisik seperti jalan, jaringan irigasi, pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan administrasi.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dapat diuraikan menjadi 2 (dua) urusan :

1. Urusan Jalan

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan realisasi kegiatan :

- Pembangunan Jalan Kabupaten
- Peningkatan Jembatan
- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jalan dan Jembatan



2. Urusan Sumber Daya Air

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 s/d 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Dengan Realisasi Kegiatan :

- Peningkatan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 serta untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.4

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		



1	Persentase panjang jalan kondisi mantap	-	-	-	27,28	28,76	31,50	32,86	48,69	27,28	28,76	32,39	34,50	43,13	100,00	100,00	102,83	104,99	88,58
2	Persentase irigasi dalam kondisi baik	-	-	-	40,00	85,00	22,00	62,00	29,13	40,00	89,21	20,77	60,00	56,67	100,00	104,95	94,41	96,77	194,54

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke....(%)					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	



Pembangunan jalan dan jembatan	76.054.631.750	104.213.502.850	112.026.203.000	159.310.696.250	276.757.836.134	66.741.182.946	102.537.000.401	98.818.490.109	156.285.359.183	276.422.260.673	87,75	98,39	88,21	98,10	99,88	506.956.601.077	479.666.484.774
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	7.632.734.197	7.505.060.600	7.973.934.600	5.288.419.600	7.186.844.800	7.516.790.094	7.271.270.090	7.927.941.699	5.245.551.200	7.180.481.800	98,48	96,88	99,42	99,19	99,91	29.837.517.957	29.397.649.443

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Agar strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif, efisien dan dapat tercapai, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*). faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari :

1. Kekuatan dan Kelemahan,
2. Tantangan dan Kendala.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah analisa swot (*strength, weaknes, opportunnities, threacts*). secara efektif analisa swot dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunnities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). dengan analisa swot, dapat diidentifikasi setiap pontensi peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.



2.4.1. TANTANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Kondisi Geografis Kabupaten Kapuas Hulu Yang Merupakan Daerah berbukit – bukit dan berawa serta bergambut.
- b. Luasnya Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dipenuhi kebutuhan infrastrukturnya.
- c. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan pelaksanaan kegiatan dilapangan
- d. Kuantitas sarana pendukung yang masih minim;
- e. Regulasi yang dinamis
- f. Dinamisnya perkembangan dunia jasa konstruksi di indonesia.
- g. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Mewujudkan Nawacita Presiden Republik Indonesia.
- b. Tuntutan Masyarakat Akan Pelayanan Prima Terhadap Pelayanan Publik Mendorong Untuk Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Melakukan Inovasi Pelayanan;
- c. Kebutuhan Dasar Akan Infrastruktur Baik Jalan Maupun Jembatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. lima tahun pertama dan kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap -tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/ UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 - 2021.



Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor- faktor, internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang keteknikan / teknis belum memadai;
2. Prasarana dan sarana penunjang kegiatan perkantoran masih perlu untuk ditingkatkan;
3. Alokasi anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur masih terbatas;
4. Luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Harus dilayani oleh jalan kabupaten, sehingga tidak semua daerah dapat dilaksanakan pembangunannya.
5. Kondisi geografis daerah membuat biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, sehingga diperlukan dana yang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan jalan kabupaten.
6. Masih banyak daerah aliran sungai (DAS) yang belum terinventarisasi sehingga menyulitkan pengembangan fasilitas pengairan;
7. Kondisi geografis sebagian besar di kecamatan merupakan daerah sungai sehingga masih perlu dibangun sarana dan prasarana pengaman tebing sungai.
8. Masih minimnya prasarana saluran saluran drainase / gorong – gorong perkotaan yang mengakibatkan adanya genangan air di beberapa tempat di wilayah perkotaan, sehingga pembangunan prasarana saluran drainase / gorong – gorong perlu dilakukan.
9. Belum tersedianya sarana dan prasarana laboratorium dan gudang workshop yang menunjang pekerjaan pengujian.
10. Belum terakreditasinya laboratorium pengujian
11. Rendahnya peran serta asosiasi jasa konstruksi dalam mendukung pembinaan masyarakat jasa konstruksi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2016 – 2021 adalah :

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

2. Misi



Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ketiga misi Kabupaten Kapuas Hulu tersebut di atas harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Misi pertama dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. misi kedua dimaknai dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi di kabupaten kapuas hulu. misi ke tiga adalah misi utama yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum Bina Margadan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Misi ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Visi :

“Tersusunnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang handal untuk mendukung indonesia sejahtera 2025”.

Misi :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mitra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air.



3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan : IPTEK, Norma, Standar, Pedoman, Manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsi-prinsip good governance.
8. Meminimalkan Penyimpangan Dan Praktik-Praktik Kkn Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dengan Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan dan Pengawasan Profesional.

3.3.2. VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi :

” Terwujudnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman serta perumahan yang handal, berbudaya dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kalimantan barat”

Misi :



Mendorong terwujudnya perumahan yang layak huni dan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan serta legitimate yang di jabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan dasar bidang perumahan.
3. Meningkatkan sistem jaringan infrastuktur jalan yang mantap untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dengan berdasarkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan meningkatkan kualitas permukiman serta cakupan pelayanan dasar.
6. Meningkatkan efektifitas dan pelayanan publik di bidang pengujian mutu konstruksi dan lingkungan.

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2011 – 2016 Ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

a. Faktor - faktor penghambat :

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
- Kemampuan SDM, Baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.
- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b. Faktor - faktor pendorong :



- Adanya Tupoksi dan Struktur Organisasi.
- Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan.
- Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Tersedianya juklak, juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kemajuan Informasi dan Teknologi.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana.
- Dukungan Dana.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UU 24 / 1992), Yang Kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26 / 2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang - Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kapuas Hulu Yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif

Yaitu :

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan.
3. pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi.
4. Ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan.
5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral.
6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.



7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan, meliputi :

- 1) Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besar seperti perkebunan, perusahaan HPH – HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, Khususnya di dalam dan disekitar kawasan hutan: taman nasional dan hutan lindung
- 2) Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi perusahaan tersebut
- 3) Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV: *High Conservation Value*) di setiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan meng-enclave lahan perusahaan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas.
- 4) Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum.
- 5) Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa denda yang besar daripada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi.
- 6) Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda
- 7) Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung.
- 9) Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan;
- 10) Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya.
- 11) Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat



- 12) Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan.
- 13) Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi :

- 1) Melakukan kajian tentang perilaku hidup satwa liar, terutama bagi satwa liar yang dilindungi. hal ini berimplikasi pada kajian mendalam dan terperinci
- 2) Perlunya kajian dan perhitungan yang komprehensif dan cermat, terutama kaitannya dengan biaya dan waktu, serta dampak terhadap ekosistem sekitarnya.
- 3) Perlu pengawasan dan penjagaan yang tinggi, terutama melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan *illegal*, khususnya *illegal logging*
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat
- 6) Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan
- 7) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi :

- 1) Penetapan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman
- 2) Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro-minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro-minapolitan, yang dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan perda sebagai payung hukum.



- 3) Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro-mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi
- 4) Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai.
- 5) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan
- 6) Perlunya dibuat lembaga riset / penelitian untuk mengkaji kesesuaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikananannya, serta kegiatan industri turunannya
- 7) Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
- 8) Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut.
- 9) Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya.
- 10) Mendorong kegiatan rehabilitasi dan reboisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang.
- 11) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi
- 12) Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- 13) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukan industri

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi :

- 1) Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan
- 2) Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan
- 3) Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan
- 4) Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :

- 1) Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sektor harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.



- 2) Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam
- 3) Program – program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya
- 2) Penetapan zona pengelolaan limbah domestik
- 3) Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- 4) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan TPA Sistem Sanitary Landfill.
- 5) Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat pemukiman.
- 6) Penaatan penerapan Prosedur Standar Operasitpa Sistem Sanitary Landfill.
- 7) Disediaknya sumur control disekitar kawasan tpa untuk mengetahui apakah air tanah disekitar kawasan tidak atau telah tercemar.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya
- 2) Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di kapuas hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut: carbon sink, reservoir air, dan penyerap air
- 4) Lahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink).

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. .



kajian yang telah dilakukan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011 - 2031 telah menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif tersebut, yang kemudian dirumuskan langkah - langkah upaya pencegahan dan pengendalian dampak untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. rekomendasi untuk meminimalkan dampak serta memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam Dan Manusia tersebut adalah:

1. Harus segera membuat peraturan daerah, baik dari tingkat provinsi dan kabupaten sebagai payung hukum segala kebijakan, rencana dan/atau program yang akan dilaksanakan di setiap sektor. paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*green development – sustainable development*) dengan mengaplikasikan *green economy* (ekonomi hijau / berkelanjutan) sangat penting dilakukan sebagai acuan yang menjiwai penyusunan turunan kebijakan dan Program RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Memaksimalkan upaya – upaya mekanisme pasar jasa lingkungan, khususnya berkaitan dengan perdagangan karbon (*carbon trade*) dan kesediaan membayar imbal jasa hulu – hilir (*willingness to pay*) di kapuas. guna mempercepat usaha ini maka perlunya pembentukan tim ahli tersendiri yang menyiapkan mekanisme tersebut, dari rencana, mediasi/fasilitasi, hingga aksi. tim ini harus berasal dari berbagai elemen *stake holder*, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan anggota masyarakat.
3. Penguatan upaya inovasi dan *marketing* ekowisata dari promosi hingga penarikan minat investor, sehingga dapat menarik wisatawan domestik dan manca negara.
4. Memasukkan muatan lokal pengenalan sumberdaya alam dan lingkungan kabupaten kapuas hulu dalam kurikulum sekolah. pendidikan lingkungan yang bermuatan lokal merupakan suatu upaya mentransfer ilmu pengetahuan bagi murid – murid sekolah yang merupakan generasi muda kapuas hulu untuk mencintai, memahami, dan manfaat fungsi dan peranan kekayaan alam kapuas hulu.
5. Pengintegrasian nilai – nilai kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat setempat dengan ilmu pengetahuan modern guna meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menanggulangi bencana.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil review terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD berdasarkan :



- 1) Gambaran Pelayanan SKPD;
- 2) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3) Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Pada K / L;
- 4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota dan;
- 5) Implikasi RTRW Bagi Pelayanan SKPD;

Maka ditentukan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
3. Penyelenggaraan *Good Governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
4. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah yang harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan dari berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna prasarana jaringan jalan.
6. Meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.
7. Mempertahankan garis pantai untuk memberikan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang sungai. mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur sda yang mengalami kerusakan karena bencana alam banjir.



8. Mengoptimalkan fungsi saluran drainase/ gorong-gorong untuk menghindari terjadinya genangan air di perkotaan.
9. Mewujudkan masyarakat jasa konstruksi yang unggul, mandiri, professional dan berdaya saing.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Adapun tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan;
3. Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah – wilayah rawan banjir dan pengaman garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi.

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. sasaran Dinas



Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Selama 5 (Lima) tahun periode 2016 - 2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Pertama :

“Terwujudnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas”

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air, dengan indikator sasaran :

- **Predikat SAKIP**

Tujuan Kedua :

“Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan “

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, dengan indikator kinerja sasaran :

- **Persentase panjang jalan kondisi mantap;**



Tujuan Ketiga :

“Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah – wilayah rawan banjir dan pengaman garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi, dengan indikator kinerja sasaran :

- **Persentase luas irigasi dalam kondisi baik**

tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 4.1. sebagai berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan /sasaran pada tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)



1.	Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas									
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	1	Predikat Sakip	CC	B	BB	BB	BB
2.	Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan									
		2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	2	Persentase panjang jalan kondisi mantap	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%
3.	Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah – wilayah rawan banjir dan pengaman Garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi									
		3.	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi	3	Persentase irigasi dalam kondisi baik	35,86%	50,00%	60,00%	68,00%	75,00%



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. Adapun Strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah;
3. Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan keseluruhan wilayah yang berorientasi lingkungan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan. kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya yang terdiri dari dana, personil, sarana dan prasarana serta waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi :

1. Memberikan petunjuk prinsip - prinsip, rambu - rambu dan signal - signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.



2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparaturnya maupun masyarakat).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

Adapun kebijakan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
6. Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
7. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong;
8. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;
9. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
10. Pemberdayaan Dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
11. Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya.



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

VISI	:	MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS			
MISI I	:	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas	1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	1. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	1. Pelayanan administrasi perkantoran	
				2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
				3. Peningkatan disiplin aparatur	
				4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	



					5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
MISI II	:	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan				
Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah – wilayah rawan banjir dan pengaman Garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi	2	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi	2.	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	1.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya
MISI III	:	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan				
Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan	3	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	3.	Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan keseluruh wilayah yang berorientasi lingkungan	1.	Pembangunan jalan dan jembatan
					2.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
					3.	Pembangunan turap/talud/bronjong
					4.	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
					5.	Pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing - masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing - masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing - masing pagu menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air kabupaten kapuas hulu dapat dilihat dalam Tabel 6.1. sebagai berikut :



Tabel 6.1
RENCANA PROGAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2016)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
						DPPA-SKPD Tahun 2017		DPPA-SKPD Tahun 2018		RKA-SKPD Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TOTAL ANGGARAN SKPD							173.208.661.750,00		179.864.000.000,00		135.474.278.700,00		295.045.348.982,32		153.411.533.869,34		153.411.533.869,34		



Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas																		
Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air			Predikat Sakip		CC		B		BB		BB		BB		BB			
		03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%	6.875.214.950,00	100,00%	7.491.172.100,00	100,00%	5.351.096.300,00	100,00%	5.960.085.400,00	100,00%	5.859.437.400,00	100,00%	5.859.437.400,00	SEKRETARIAT
		1.03.1.03.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Administrasi yang tertib		3850 Materai	17.700.000,00	2.910 Materai	13.575.000,00	2.493 Materai	11.775.000,00							



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 - 2021

		1.03.1 .03.01 .01.00 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Proses Administrasi dan Pelayanan yang Maksimal		12 Bulan	287.270.000,00	12 Bulan	102.000.000,00	12 Bulan	194.400.000,00	12 Bulan	168.000.000,00	12 Bulan	168.000.000,00	12 Bulan	168.000.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.00 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	87.500.000,00	1 Tahun	84.300.000,00	1 Tahun	39.000.000,00	1 Tahun	39.000.000,00	1 Tahun	39.000.000,00	1 Tahun	39.000.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.00 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Administrasi kelengkapan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang Optimal		12 Bulan	20.000.000,00	12 Bulan	27.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	24.000.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.00 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan yang memadai dan Tepat Waktu		312 Ob	180.480.000,00	312 Ob	167.280.000,00	336 Ob	193.080.000,00	336 Ob	193.080.000,00	336 Ob	193.080.000,00	336 Ob	193.080.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.00 8	Penyediaan jasa penganan dan kebersihan kantor	Tersedianya Kebersihan Kantor untuk Kenyamanan dalam menjalankan Aktifitas Pekerjaan sehari-hari.		1 Tahun	241.260.000,00	1 Tahun	39.582.000,00	1 Tahun	14.435.000,00	1 Tahun	14.435.000,00	1 Tahun	14.435.000,00	1 Tahun	14.435.000,00		



		1.03.1 .03.01 .01.01 0	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia nya Alat Tulis Kantor yang Optimal.		1 Tahun	250.733.850,00	1 Tahun	244.656.700,00	1 Tahun	235.686.200,00	1 Tahun	235.686.200,00	1 Tahun	235.686.200,00		
		1.03.1 .03.01 .01.01 1	Penyediaan barang cetakan dan penggan daan	Tersedia nya Barang Cetakan dan Penggan daan untuk Kelancar an Administ rasi yang tertib.		1 Tahun	90.401.300,00	1 Tahun	85.343.600,00	1 Tahun	68.701.000,00	1 Tahun	68.701.000,00	1 Tahun	68.701.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.01 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Terealisasi nya Program Capaian Penyediaan Kompon en Instalasi Listrik serta Penerangan Bangunan Kantor		1 Tahun	98.500.000,00	1 Tahun	9.000.000,00	1 Tahun	98.879.000,00	1 Tahun	56.000.000,00	1 Tahun	56.000.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.01 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia nya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk tertib Administ rasi.		183 Buah	466.167.450,00	66 Buah	434.978.000,00		-	12 Buah	100.648.000,00	-	-		
		1.03.1 .03.01 .01.01 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedia nya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Tempa t kerja.		12 Bulan	28.800.000,00	12 Bulan	28.200.000,00								



		1.03.1 .03.01 .01.01 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai		11 Bulan	278.950.000,00	11 Bulan	198.595.000,00	11 Bulan	82.468.000,00								
		1.03.1 .03.01 .01.01 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terealisasi kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Untuk Kelancaran Tugas		180 Ok	1.493.404.000,00	145 Ok	1.280.626.000,00	76 Ok	714.875.900,00	76 Ok	841.376.000,00	76 Ok	841.376.000,00	76 Ok	841.376.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.01 9	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Terealisasi Kegiatan dilapangan melalui Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah yang Optimal.		1790 Ok	3.081.000.000,00	1576 Ok	3.363.755.000,00	1.169 Ok	2.274.080.000,00	1.169 Ok	2.725.200.000,00	1.233 Ok	2.725.200.000,00	1.233 Ok	2.725.200.000,00		
		1.03.1 .03.01 .01.02 6	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Terealisasi Program Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa		108 Ob	24.074.350,00	94 Ob	19.200.000,00	30 Ob	7.200.000,00								
		1.03.1 .03.01 .01.03 1	Penyusunan RKA dan DPA	Tersedianya Dokumentasi SKPD		2 Dokumen	14.774.000,00	2 Dokumen	17.025.000,00	2 Dokumen	11.683.400,00								



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 - 2021

		1.03.1.03.01.01.036	Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersedia nya Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Yang Optimal di Lingkungan Kerja	156 Ob	163.200.000,00	840 Ob	1.246.532.800,00	888 Ob	1.235.632.800,00								
		1.03.1.03.01.01.066	Penyediaan jasa publikasi	Tersedia nya Bahan Bacaan di Lingkungan Tempat Kerja	1 Tahun	51.000.000,00	1 Tahun	129.523.000,00	1 Tahun	117.000.000,00								
		03.01.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	453.656.000,00	100,00%	658.504.000,00	100,00%	552.848.000,00	100,00%	1.704.890.500,00	100,00%	550.512.000,00	100,00%	550.512.000,00	SEKRETARIAT	
		1.03.1.03.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terealisasi nya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	-	-	-	3 Unit	1.154.378.500,00	-	-	-	-		
		1.03.1.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	4 Kegiatan	255.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000,00								



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 - 2021

		1.03.1.03.01.02.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terealisasi Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional serta Perawatan dan untuk Kelancaran bertugas		1 Tahun	425.536.000,00	1 Tahun	393.504.000,00	1 Tahun	337.848.000,00	1 Tahun	335.512.000,00	1 Tahun	335.512.000,00	1 Tahun	335.512.000,00		
		1.03.1.03.01.02.02.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kab. Kapuas Hulu		1 Tahun	28.120.000,00	1 Tahun	10.000.000,00	1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.000.000,00	1 Tahun	15.000.000,00		
		03.01.03	peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun		90,00 %	120.010.000,00	95,00 %	-	95,50%	12.936.000,00	97,50%	165.000.000,00	97,50%	-	100,00 %	-	SEKRETARIAT	
		1.03.1.03.01.03.00.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan apalnya	Tersedianya Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya		110 Pasang	77.000.000,00	-	-	6 Pasang	12.936.000,00	110 Pasang	88.000.000,00		-		-		
		1.03.1.03.01.03.00.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu		110 Pasang	43.010.000,00	-	-	-	-	110 Pasang	77.000.000,00		-		-		



		03.01.05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		85,00 %	853.365.000,00	87,00 %	622.549.000,00	85,00%	109.176.000,00	95,00%	248.769.000,00	95,00%	248.769.000,00	95,00 %	248.769.000,00	SEKRETARIAT	
		1.03.1.03.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya Pemahaman Pegawai di Lingkungan Kerja Sehingga Dapat Menjalankan Tugas Sesuai Tupoksinnya		69 Ok	853.365.000,00	34 Ok	622.549.000,00	34 Ok	109.176.000,00	34 Ok	248.769.000,00	34 Ok	248.769.000,00		248.769.000,00		
		1.03.1.03.01.05.036	Belanja Honorarium Non PNS	Terlaksananya Kegiatan Senam DPU, BM dan SDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		03.01.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100,00 %	162.118.000,00	100,00 %	148.979.235,00	100,00 %	121.986.500,00	100,00%	121.986.500,00	100,00%	121.986.500,00	100,00 %	121.986.500,00	SEKRETARIAT	



		1.03.1 .03.01 .06.00 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (LAKIP, Renja, RKT, PKT dan IKU)		1 Dokumen	6.124.000,00	5 Dokumen	15.640.700,00	5 Dokumen	11.993.500,00	5 Dokumen	11.993.500,00	5 Dokumen	11.993.500,00	5 Dokumen	11.993.500,00		
		1.03.1 .03.01 .06.00 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertib administrasi		1 Dokumen	43.856.500,00	1 Dokumen	16.350.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.03.1 .03.01 .06.01 6	Penyusunan standart operasional prosedur SKPD	Terlaksananya Penyusunan Standar Operatif Prosedur		1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	1.350.000,00	1 Dokumen	1.350.000,00	1 Dokumen	1.350.000,00	1 Dokumen	1.350.000,00		
		1.03.1 .03.01 .06.03 0	Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan		2 Dokumen	3.102.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 - 2021

		1.03.1 .03.01 .06.03 5	Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi	Terealisasi Penyusunan serta Pemeliharaan Jaringan Komputer secara Optimal		9 Dokumen	90.000.000,00	9 Dokumen	90.000.000,00	9 Dokumen	95.559.000,00	9 Dokumen	95.559.000,00	9 Dokumen	95.559.000,00	9 Dokumen	95.559.000,00		
		1.03.1 .03.01 .06.03 6	Penyusunan rencana kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Renja DPU.BM &SDA		1 Dokumen	3.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.03.1 .03.01 .06.04 2	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD,LKPJ)		2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.500,00	2 Dokumen	5.000.500,00	2 Dokumen	5.000.500,00	2 Dokumen	5.000.500,00		
		1.03.1 .03.01 .06.04 7	Penyusunan laporan tahunan proyek	Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan Proyek DPU BM&SDA		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	4.759.000,00	1 Dokumen	4.759.000,00	1 Dokumen	4.759.000,00	1 Dokumen	4.759.000,00		
		1.03.1 .03.01 .06.05 5	Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai	Terlaksananya penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai		-	-	1 Dokumen	6.709.500,00	1 Dokumen	3.324.500,00	1 Dokumen	3.324.500,00	1 Dokumen	3.324.500,00	1 Dokumen	3.324.500,00		



		1.03.1 .03.01 .06.07 0	Penyusunan analisis jabatan	Tercapainya laporan penyusunan analisis jabatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air		-	-	1 Kegiatan	7.779.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.1 .03.01 .06.07 3	Penyusunan indikator kinerja utama	Terlaksananya penyusunan Indeks Kinerja Utama DPU.BM &SDA		1 Dokumen	2.910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.1 .03.01 .06.08 3	Inventarisasi Asset	Tercapainya Proses Data Inventarisasi Asset Yang Memadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya daerah irigasi dan infrastruktur pengendalian banjir pada wilayah - wilayah rawan banjir dan pengaman Garis sungai pada kewenangan kabupaten yang rawan abrasi																			
	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi			Persentase irigasi dalam kondisi baik															
		03.01.24	Pengembangan dan Penegelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase irigasi primer dan Sekunder dalam kondisi baik	29,13%	35,86 %	9.603.894.800,00	50,00 %	8.615.173.500,00	60,00%	11.034.151.000,00	68,00%	10.967.902.090,07	75,00%	10.556.822.910,50	75,00 %	10.556.822.910,50	BID.SDA	



		1.03.1.03.01.24.010	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi	Luas Irigasi yang direhabilitasi		20 Paket	8.839.518.800,00	20 Paket	8.615.173.500,00	-	11.034.151.000,00		10.967.902.090,07		10.556.822.910,50		10.556.822.910,50		
		1.03.1.03.01.24.018	Perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		3 Paket	464.376.000,00	-	-	-	-		-		-		-		
		1.03.1.03.01.24.019	Penyusunan Database Jaringan Irigasi	Terlaksananya penyusunan Database Jaringan Irigasi		1Paket	300.000.000,00	-	-	-	-		-		-		-		
Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan																			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan			Persentase panjang jalan kondisi mantap															
		03.01.15	Pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kondisi baik	48,69%	50,00 %	149.122.625.000,00	55,00 %	155.559.341.365,00	60,00%	114.324.506.900,00	65,00%	264.170.758.492,25	70,00%	126.805.758.492,25	70,00 %	126.805.758.492,25		BID.BINA MARGA
		1.03.1.03.01.15.003	Pembangunan Jalan Kabupaten	Panjang jalan terbangun		27 Paket	110.279.047.000,00	26 Paket	135.434.644.365,00	-	86.809.858.900,00		211.970.000.000,00		125.200.000.000,00		125.200.000.000,00		



		1.03.1 .03.01 .15.00 5	Peningkatan Jembatan	Jumlah jembatan yang ditangani		7 Paket	38.275.415.000,00	8 Paket	20.124.697.000,00	-	27.514.648.000,00		52.200.758.492,25		1.605.758.492,25		1.605.758.492,25		
		1.03.1 .03.01 .15.01 1	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Jembatan	Terelisasinya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Jembatan Kabupaten		1 Paket	350.000.000,00	-	-	-	-		-		-		-		
		1.03.1 .03.01 .15.01 2	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Kontrak Tahun Jamak Peningkatan Jalan Kabupaten KH	Terealisasi asinya Penyusunan Rancangan Paerda Tentang Kontrak Tahun Jamak Peningkatan Jalan Kabupaten KH		1 Paket	218.163.000,00	-	-	-	-		-		-		-		
		03.01. 16	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Pembangunan Drainase/Gorong-gorong dalam kondisi baik			-	600M	1.124.893.000,00	1850M	-	3100M	2.250.000.000,00	5000M	3.384.671.000,00	5000M	3.384.671.000,00	BID.SDA	
		1.03.1 .03.01 .16.00 3	Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase /Gorong-gorong yang dibangun		-	-	3 Paket	1.124.893.000,00	-	-		2.250.000.000,00		3.384.671.000,00		3.384.671.000,00		



		03.01.17	Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun		-	492M	445.356.000,00	120M	200.000.000,00	165M	2.647.500.000,00	70M	1.075.119.566,59	70M	1.075.119.566,59	BID.SDA	
		1.03.1.03.01.17.003	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun		-	2 Paket	445.356.000,00	1 Paket	200.000.000,00		2.647.500.000,00		1.075.119.566,59		1.075.119.566,59		
		03.01.18	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi / terpelihara		28,72 %	5.586.362.000,00	4.697.727.800,00	36,81%	3.459.121.000,00	41,71%	6.500.000.000,00	90,21%	4.500.000.000,00	90,21 %	4.500.000.000,00	UPJJ I & UPJJ II	
		1.03.1.03.01.18.008	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Persentase terpeliharaanya jalan dan jembatan kabupaten		23 Kecamatan	5.586.362.000,00	4.697.727.800,00	23 Kecamatan	3.459.121.000,00	23 Kecamatan	6.500.000.000,00	23 Kecamatan	4.500.000.000,00	23 Kecamatan	4.500.000.000,00		
		03.01.23	Pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi	Persentase pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi		80,00 %	431.416.000,00	500.304.000,00	85,00%	308.457.000,00	87,50%	308.457.000,00	90,00%	308.457.000,00	90,00 %	308.457.000,00	JAKON	
		1.03.1.03.01.23.006	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan		1 paket	113.143.000,00	124.800.000,00	1 paket	29.000.000,00								



		1.03.1 .03.01 .23.00 9	Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium Kebencanaan	Persentase terpeliharanya laboratorium kebinamargaan		2 paket	60.000.000,00	1 paket	73.700.000,00	1 paket	75.000.000,00								
		1.03.1 .03.01 .23.01 8	Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan laboratorium	Terlaksananya Pembuatan Disain Mix Formula dan Pengujian Mutu Konstruksi di Lapangan		800 Ok	109.000.000,00	1.210 0 Ok	39.600.000,00	1.350 Ok	43.350.000,00								
		1.03.1 .03.01 .23.01 9	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten kapuas hulu		1 Kegiatan	48.923.000,00	1 Kegiatan	54.247.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1.03.1 .03.01 .23.02 3	Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	Terlaksannnya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu		1 Tahun	100.350.000,00	1 Tahun	91.850.000,00	1 Tahun	51.050.000,00								



		1.03.1 .03.01 .23.02 4	Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi		-	-	1 Kegiatan	116.107.000,00	1 Kegiatan	110.057.000,00	1 Kegiatan	110.057.000,00	1 Kegiatan	110.057.000,00	1 Kegiatan	110.057.000,00		
--	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	---	---	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	--	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).



Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.

TABEL 7.1
INDKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Sakip		CC	B	B	B	BB	BB



2	Persentase panjang jalan kondisi mantap	48.69	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
3	Panjang saluran drainase/ gorong-gorong (meter).			600M	1850M	3100M	5000M	5000M
4	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi / terpelihara		28,72%	32,77%	36,81%	41,71%	90,21%	90,21%
5	Persentase pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi		80,00%	82,50%	85,00%	87,50%	90,00%	90,00%
6	Persentase irigasi dalam kondisi baik	29.13%	35,86%	50,00%	60,00%	68,00%	75,00%	75,00%
7	Panjang daerah rawan abrasi		-	492 M	120 M	165 M	70 M	70 M



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Renstra didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak – pihak yang dilayani.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam pengambilan keputusan. hal - hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada;



3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Berhasilnya usaha – usaha pembangunan di kabupaten kapuas hulu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kejujuran dan keterbukaan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, Desember 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Hj. Ana Mariana,S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002